

TAJUK RENCANA

Danais Melawan Covid-19

KABAR baru terkait penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) DIY 2021 kembali bergulir. Kalau sebelumnya peruntukan Danais hanya untuk menggeliatkan aktivitas seni budaya yang terdampak pandemi Covid-19, kali ini sebagian bisa digunakan untuk penanganan Covid-19.

Seperti diungkapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pemda DIY bersama DPRD DIY sedang mendesain penganggaran Danais untuk penanganan Covid-19 sampai ke kalurahan. Rencananya untuk tahap awal Pemda DIY dan DPRD DIY sepakat mengalokasikan Danais Rp 50 juta untuk setiap kalurahan/desa dari danais untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ini merupakan tambahan alokasi dana di desa untuk penanganan Covid-19, karena sebelumnya kalurahan/desa sudah mendapat anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemda dan APBDes. Terkait hal itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa penggunaan dana Rp 50 juta harus jelas. Hal itu mengingat selama ini desa telah mendapatkan anggaran dari APBN, APBD dan APBDes. Pertanggungjawaban penggunaan masing-masing anggaran tersebut berbeda.

Menurut Gubernur, sejak awal tahun ini Pemda DIY juga sudah merealisasikan dana penanganan Covid-19 dari APBD 2021 serta refocusing anggaran Rp 326 miliar. Bahkan sampai saat ini sudah terealisasi sekitar Rp 140,9 miliar atau 43 persen. Meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk menanggapi pandemi Covid-19 yang masih fluktuatif.

Pemanfaatan sebagian Danais

2021 untuk penanganan Covid-19 tentu menjadi harapan baru untuk mayoritas masyarakat desa, yang selama ini merasa tidak pernah ikut 'menikmati' Danais. Termasuk ketika akhir Juni lalu Danais DIY termin II 2021 sebesar Rp 858 miliar telah cair dan sudah berada di kas Pemda DIY, sehingga Danais DIY 2021 yang sudah cair sekitar 80 persen dari total Rp 1,32 triliun. Namun dari anggaran termin II 2021 sebesar Rp 858 miliar itu, Rp 249 miliar di antaranya akan digunakan untuk pengadaan tanah yang masuk dalam urusan tata ruang dan urusan kebudayaan.

Dengan adanya kebijakan baru Pemda DIY yang akan mengalihkan sebagian Danais untuk penanganan Covid-19, tentu benar-benar menuntut kesiapan pemerintah kalurahan dan pemerintah desa. Sebab, seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta, anggaran Belanja Tak Terduga yang digelontorkan DPRD DIY sebesar Rp 60 miliar untuk penanganan Covid-19 ternyata pelaksanaannya belum maksimal. Bahkan sampai saat ini dananya masih ada di atas Rp 50 miliar.

Menurutnya, dana tersebut dari awal sudah dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun realisasinya masih sangat kecil, meskipun sebenarnya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi krisis karena dampak pandemi Covid-19.

Akankah pemanfaatan alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari Danais kali ini juga tidak akan maksimal? Tentu akan sangat tergantung kesiapan pemerintah desa dan pemerintah kalurahan. □

'Core Values' Keistimewaan

Haryadi Baskoro

PENGUATAN budaya kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) seperti yang dilakukan dengan peluncuran "Core Values and Employer Branding ASN" pada 27 Juli 2021 silam bukanlah hal baru bagi Yogya. Peluncuran nilai dasar/inti itu sendiri dalam rangka peringatan hari jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), dipimipi langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Keistimewaan Yogya sejatinya sudah surplus nilai-nilai budaya. Untuk budaya kerja kita bukan hanya punya nilai *nyawiji, greget, sengguh ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri, rendah hati, bertanggungjawab) yang merupakan watak kesatria (satriya). Kita juga punya nilai-nilai dasar *hamemayu hayuning bawana* dan *sangkan paraning dumadi* serta *manunggaling kawula lan gusti* yang mendasari budaya kerja ASN. Sebagai pusat peradaban, mata air budaya Yogya tidak pernah mengalami kekeringan nilai-nilai

Berorientasi Pelayanan

Nilai dasar 'berakhlak' (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) yang diluncurkan di Istana Kepresidenan Bogor itu bukan hal baru bagi Yogya. Pasal 5 ayat (5) UU Keistimewaan DIY sudah menegaskan supaya pemerintahan di DIY bekerja berdasarkan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakkan hukum. ASN DIY dari pucuk pimpinannya hingga pekerja di level terendah dituntut bekerja dengan standar nilai-nilai yang tinggi.

Yogya semestinya unggul dalam nilai dasar 'berorientasi pelayanan'. Kita punya prinsip *sepi ing pamrih rame ing gawe* (bekerja keras tanpa pamrih). Dalam kepemimpinan Sultan HB IX (1945-1988), beliau mengajarkan nilai dasar 'tahta untuk rakyat', bahwa kekuasaan, kedudukan, jabatan itu harus untuk



KR-JOKO SANTOSO

melayani masyarakat. Saat naik tahta pada 1989, Sultan HB X menegaskan tekadnya yang menjadi nilai budaya kerja beliau. Antara lain adalah tekad untuk lebih banyak memberi daripada menerima serta tekad tidak mempunyai ambisi apa pun kecuali berusaha mensejahterakan rakyat.

Artinya, Yogya tidak perlu digurui dalam organisasi, lintasdaerah, lintasilmu menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintassektor dan lintasdisiplin." Dalam keterpurukan akibat pandemi ini, pilihan kita adalah *collabs*(kolaborasi) atau *collapse* (runtuh).

Silang Birokrasi

Namun prinsip kolaborasi sebenarnya sudah sangat ditandaskan oleh Sultan HB X dalam Pidato Gubernur DIY tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 pada Agustus 2017 silam. Spirit visi 'Abad Samudera' menurut HB X adalah semangat 'perjumpaan' yang diterjemahkan sebagai praktik 'silang birokrasi', 'silang SKPD' dan 'silang kelembagaan'. Artinya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ada kolaborasi, jangan ada lagi 'ego sektoral'.

Dalam pidato, HB X mengatakan bahwa praktek 'silang SKPD' diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan program-program besar yang berdampak besar. Dalam masa akhir RPJMD DIY periode 2017-2022 ini tentu kita jangan bertindak too big and too late. Tetapi Covid-19 ini sejatinya menantang Pemda DIY untuk melakukan perkara besar, yaitu mengatasi besarnya masalah pandemi itu sendiri. Untuk itulah semua unsur dalam sistem pemerintahan di DIY harus berkolaborasi dalam tindakan nyata yang terukur. □

***)Dr Haryadi Baskoro, pakar Keistimewaan Yogya.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Birokrasi dalam Menanggulangi Pandemi

Paulus Mujiran

PERSOALAN birokrasi menjadi salah satu diskursus penting dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Kondisi serupa ini sering dialami pemerintahan Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru hingga kini. Sejak awal pandemi, masyarakat berhadapan dengan sejumlah persoalan birokrasi. Perbedaan kebijakan di lapangan seringkali ditemukan dalam berbagai lini di tengah penanggulangan yang tengah dijalankan. Aneka krisis seperti ketiadaan tempat tidur rumah sakit, obat-obatan, oksigen, meninggalnya pasien isoman tanpa penanganan adalah cermin buruknya kinerja birokrasi.

Indonesia saat ini memasuki fase gelombang kedua pandemi Covid-19. Kondisi ini seharusnya menjadi evaluasi lambannya kinerja pemerintah dalam mengatasi kasus pandemi. Dalam menanggulangi wabah, diperlukan ketegasan pemerintah dalam memutuskan kebijakan guna memutus persebaran yang begitu cepat. Namun yang kerap terjadi kebijakan itu selain cepat berubah, arahan yang disampaikan tidak diterjemahkan sama oleh semua aparatur daerah.

Asumsi

Alih-alih masyarakat patuh, kebijakan yang berubah-ubah menyebabkan resistensi. Kasus Covid-19 terus meledak namun birokrasi cenderung biasa-biasa saja seperti tidak ada bencana. Mestinya pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan mengajak duduk bersama pemerintah daerah sehingga lahir solusi bersama dalam merumuskan kebijakan. Namun realitanya pemerintah pusat tidak mengajak daerah untuk merencanakan bersama dengan asumsi setiap instruksi akan dipatuhi daerah.

Chester Barnard menyatakan eksistensi organisasi sebagai suatu sistem kerja sama bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk bekerjasama mencapai tujuan yang sama pula. Dalam penanganan

sehingga dampaknya adalah pemerintahan yang solid. Semua pelayanan, pelayanan cepat, reponsif dan memuaskan selama masa pandemi.

'Ngayomi'

Ketika birokrasi menghadapi ujian seperti pandemi kita telah siap mengatasinya karena memiliki birokrasi yang kuat namun tidak kaku dalam mengimplementasikan kebijakan (Pandu Wibowo, 2020). Di tengah ledakan kasus Covid-19 rakyat membutuhkan birokrasi yang *ngayomi* serta mau bekerja keras untuk menuntaskan pandemi.

Menurut Warren Bennis (Miftah Thoha, 2002) setiap zaman akan mengembangkan suatu bentuk tatanan sistem organisasi yang sesuai zamannya. Artinya sistem birokrasi berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zamannya. Birokrasi fleksibel menyesuaikan kebutuhan yang berkembang di masyarakatnya. Tentu kita berharap di tengah pandemi ini birokrasi pemerintah menemukan bentuknya yang lebih tanggap dalam merespons pandemi. □

***)Paulus Mujiran, Alumnus Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.**

Pojok KR

Pemda DIY alokasikan sebagian Danais 2021 untuk penanganan Covid-19 di desa.
-- Desa harus siap. ***

Desain sudah disepakati, aksesibilitas YIA akan semakin mudah.
-- Juga murah? ***

Yogyakarta Kota Layak Anak terbaik untuk kategori utama.
-- Layak dan peduli.

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA
Naskah bisa dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/Scan KTP
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sayangi Mata Saat Daring

MARA pandemi membuat rutinitas sehari-hari berubah menjadi 180 derajat. Aktivitas yang biasa dilakukan, sekarang dialihkan menjadi serba online. Tidak bisa dipungkiri, hal tersebut membuat kesehatan mata di masa sekarang ini mengalami penurunan kemampuan penglihatan ataupun sejumlah gangguan kesehatan mata lainnya.

Sebenarnya bukan hanya saat-saat seperti ini gangguan pada kesehatan mata itu ada. Namun, adanya pandemi Covid-19 lebih berpotensi mengakibatkan peningkatan gangguan pada kesehatan mata. Karena tidak ada pilihan lain, kita harus tetap menjaga produktivitas selama di rumah saja secara online. Saat itulah terjadi yang namanya peningkatan *screen time*.

Lalu apa yang dapat kita lakukan saat ini? Sebaiknya kita mulai menerapkan kebiasaan yang berdampak baik bagi kesehatan khususnya kesehatan mata. Karena mata merupakan salah satu aset berharga yang kita miliki. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa terlalu lama menatap layar smartphone atau laptop mengakibatkan sejumlah gangguan pada penglihatan. Seperti gejala mata lelah, mata kering, mata gatal, bahkan penambahan ukuran kacamata bagi yang memiliki kelainan rabun jauh. Ada tiga hal sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga ke-

sehatan mata saat daring.

Hal yang pertama adalah mengatur posisi duduk yang nyaman saat sedang daring. Usahakan posisi gadget sejajar dengan pandangan mata dan berjarak sekitar 30-40 cm sehingga kepala tidak perlu menunduk atau mendongak. Kemudian duduk dengan posisi tegak dan berada di ruangan yang cukup pencahayaan. Ketika sudah duduk dengan posisi yang nyaman, maka kegiatan secara daring dapat berjalan dengan optimal dan mata pun tetap terjaga kesehatannya.

Rajin mengonsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin A adalah hal sederhana kedua yang dapat dilakukan. Mengapa demikian? Karena dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dapat membantu sistem penglihatan kita menjadi lebih baik.

Hal sederhana terakhir adalah jangan lupa untuk mengedipkan mata. Menurut para ilmuwan, normalnya manusia mengedipkan mata 15-20 kali permenit. Namun, intensitas mengedipkan mata menurun akibat terlalu serius ketika menatap layar gadget. Padahal, hanya dengan mengedipkan mata dapat menjaga kelembapan mata sehingga mata tidak mudah lelah. Maka dari itu, mulailah menerapkan tiga hal sederhana di atas ke diri sendiri. □

Herawati Setiya Ningrum
Mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, UAD.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019).
Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisariss Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurinya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krojogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyanto Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banaryumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) ... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.